

INTERNET FINANCIAL REPORTING MELALUI E-GOVERNMENT SEBAGAI SARANA TRANSPARANSI, PARTISIPASI, DAN AKUNTABILITAS PUBLIK DI SUMATERA SELATAN

Verawaty

Dosen Universitas Bina Darma

Jalan Jenderal Ahmad Yani No. 3, Palembang

Sur-el: verawaty@binadarma.ac.id

Abstract: *This research is aimed to determine and analyze the availability of Internet Financial Reporting (IFR) through e-government by examining four variables which are assumed to have a positive association. The results indicate there are only two positive associations between population and size of local government with the provision of the financial statements on the internet through e-government as a means of public transparency, participation and accountability. When viewed from the availability of IFR in e-government, a majority of governments in South Sumatra that already have e-government have not utilized this medium in public sector accounting. In case this is done, it will reflect the implementation of good governance, namely as a form of government and public administration which works efficiently in order to meet the needs of the people which is the need of public information.*

Keywords: *E-Government, Internet Financial Reporting (IFR), Public Transparency, Participation, accountability.*

Abstrak: *Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis ketersediaan Internet Financial Reporting (IFR) melalui e-government dengan menguji empat variabel yang diasumsikan memiliki hubungan yang positif. Hasil menunjukkan hanya ada dua asosiasi positif antara populasi dan ukuran pemerintah daerah dengan penyediaan laporan keuangan di internet melalui e-government sebagai sarana transparansi, partisipasi dan akuntabilitas publik. Bila dilihat dari ketersediaan IFR dalam e-government, mayoritas pemerintah di Sumatera Selatan yang sudah memiliki e-government belum dimanfaatkan media ini dalam akuntansi sektor publik. Dalam hal ini jika dilakukan, maka akan mencerminkan pelaksanaan good governance, yaitu sebagai bentuk pemerintahan dan administrasi publik yang bekerja secara efisien dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat yang merupakan kebutuhan informasi publik.*

Kata Kunci: *E-Government, Internet Financial Reporting (IFR), Transparansi, Partisipasi, Akuntabilitas Publik.*

1. PENDAHULUAN

Regulasi yang memenuhi kebutuhan publik untuk mendapatkan akses informasi dari penyelenggara pemerintahan adalah Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Pada Pasal 7 Ayat 1, Undang-Undang ini menyatakan bahwa setiap Badan Publik wajib menyediakan, memberikan, dan/atau menerbitkan Informasi Publik yang berada di bawah kewenangannya kepada Pemohon Informasi Publik, selain informasi

yang dikecualikan sesuai ketentuan. Regulasi ini memberi implikasi yuridis kepada lembaga-lembaga yang melalaikan fungsinya untuk mewujudkan transparansi informasi publik.

Sebagai media untuk mempublikasikan informasi publik tersebut, badan publik memiliki *e-government*. Di Indonesia, inisiatif *e-government* telah diperkenalkan melalui Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2001 tentang Telematika (Telekomunikasi, Media, dan Informatika). Dalam instruksi itu dinyatakan bahwa aparat pemerintah harus menggunakan

teknologi telematika untuk mendukung *good governance* dan mempercepat proses demokrasi. Menyadari akan besarnya manfaat *e-government* tersebut, pemerintah Indonesia telah mengeluarkan kebijakan tentang penerapan *e-government* dalam bentuk Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2003. Kini penerapan *e-government* semakin berorientasi pada peningkatan kualitas layanan publik secara efektif dan efisien.

Akan tetapi perlu digaris bawahi bahwa *e-government* bukan hanya sekedar publikasi situs oleh pemerintah atau menyampaikan informasi kualitatif. Inovasi dalam implementasi *e-government* bisa dimaksimalkan untuk menyampaikan informasi kuantitatif atau informasi publik yang berkaitan dengan pertanggungjawaban finansial. Bila dikaitkan dengan transparansi, partisipasi, dan akuntabilitas pada aspek keuangan daerah melalui *Internet Financial Reporting* (IFR), yang terjadi di lapangan, masih banyak pemerintah daerah yang tidak memberikan informasi finansial melalui *e-government* yang dimiliki. Padahal laporan keuangan merupakan bentuk pertanggungjawaban pemerintah daerah yang akan digunakan oleh berbagai pihak eksternal yang berkepentingan terhadap pemerintah daerah tersebut, baik secara langsung maupun tidak langsung (Halim, 2007).

Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 9 semakin menguatkan pentingnya pelaporan akuntansi sektor publik. Regulasi ini menyatakan bahwa informasi publik yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala oleh badan publik, salah satunya adalah informasi mengenai

laporan keuangan. IFR melalui *e-government* merupakan media yang paling memenuhi aspek 3E (Efisiensi, Efektivitas, dan Ekonomi) untuk diseminasi laporan keuangan kepada semua *stakeholder* publik antara lain pemerintah pusat, pemerintah daerah lain, DPRD, BPK, analis ekonomi, investor, kreditur, donatur, dan rakyat. Terlebih hampir semua pemerintah daerah di Indonesia telah memiliki *e-government*.

Bila dikaitkan dengan transparansi, partisipasi, dan akuntabilitas pada aspek keuangan daerah melalui IFR (*Internet Financial Reporting*), yang terjadi di lapangan, masih banyak pemerintah daerah yang tidak memberikan informasi finansial melalui *e-government* yang dimiliki. Padahal laporan keuangan merupakan bentuk pertanggungjawaban pemerintah daerah yang akan digunakan oleh berbagai pihak eksternal yang berkepentingan terhadap pemerintah daerah tersebut, baik secara langsung maupun tidak langsung (Halim, 2007). Padahal idealnya, *e-government* merupakan sarana yang paling efektif dalam penyampaian informasi secara lebih luas dan cepat bagi pihak *stakeholder* antara lain DPRD, masyarakat, pemerintah pusat, dan juga Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang dilindungi haknya atas informasi yang bersifat publik.

Penulis ingin menganalisis probabilitas *availability* (ketersediaan) *Internet Financial Reporting* (IFR) melalui *e-government* dengan variabel-variabel yang diasumsikan memiliki asosiasi positif, yaitu *budget* (APBD), *size*, *debt*, dan *population* semua pemerintah daerah tingkat kabupaten/kota di Sumatera Selatan.

Variabel *budget* dengan proksi APBD pemerintah daerah diasumsikan memiliki asosiasi dengan ketersediaan IFR melalui *e-government* karena kondisi keuangan memberikan biaya dan keuntungan politis bagi kepala daerahnya. Jika hasil (positif atau surplus ataupun negatif atau defisit), pemerintah daerah mungkin memiliki dorongan untuk menyajikan atau tidak menyajikan informasi laporan keuangannya melalui *e-government* yang dimiliki. Adapun variabel *size* pemerintah daerah dengan proksi jumlah pendapatan yang ada dalam LRA juga diasumsikan memiliki asosiasi positif terhadap ketersediaan IFR. Pendapatan tersebut mengindikasikan kemampuan pemerintah daerah tersebut, artinya dengan pendapatan daerahnya mampu membiayai semua belanjanya termasuk biaya *e-government*. Artinya diasumsikan jika pendapatannya besar, maka kemampuan daerah tersebut untuk memiliki *e-government* dan bereksplorasi dengan semua konten yang dapat mempublikasikan data kepada publik juga lebih besar.

Jika dikaitkan dengan variabel *debt*, dorongan yang diberikan oleh pemilik hutang (pemerintah daerah) untuk mempublikasikan laporan keuangan lebih dominan daripada biaya-biaya atau tekanan-tekanan regulasi dan politis. Hal ini disebabkan oleh pemberi hutang (debitur) akan menuntut transparansi dan akuntabilitas dengan cara yang paling mudah diakses, yaitu melalui *e-government*. Adapun dengan variabel *population*, anggaran teknologi informasi yang lebih besar akan lebih membiayai daerah dengan suatu fungsi teknologi informasi yang mampu mendesain dan mempertahankan *website* yang

lebih canggih dengan aksesibilitas yang paling mudah. Hal ini berasosiasi dengan *population*, semakin besar kota, semakin besar jumlah penduduk dan semakin besar pula anggaran yang terkumpul dan tentunya semakin tinggi pula tuntutan akan fungsi akuntansi serta aksesibilitas terhadap informasi laporan keuangannya.

Penelitian-penelitian terdahulu menjadi landasan dalam merumuskan hipotesis penelitian untuk setiap variabel yang diasumsikan memiliki asosiasi positif dengan *availability* (ketersediaan) *Internet Financial Reporting* (IFR). Penelitian dari Indonesia yaitu penelitian Verawaty (2012), sedangkan penelitian dari luar negeri, yaitu penelitian Styles dan Tennyson (2007), Laswad *et al* (2005), Chase dan Phillips (2004), Gore (2004), Groff dan Pittman (2004), Brecher *et al* (2003), Giroux dan McLelland (2003), dan Giroux dan Shield (1993).

Isu penelitian tentang *availability* (ketersediaan) *Internet Financial Reporting* (IFR) melalui *e-government* baru pertama kali diangkat di Indonesia, yaitu oleh Verawaty (2012) dengan sampel pemerintah daerah tingkat provinsi. Akan tetapi dari lima variabel yang diasosiasikan dengan ketersediaan IFR melalui *e-government*, tidak ada yang terkonfirmasi. Padahal pada penelitian IFR di negara lain, untuk variabel yang sama, yaitu *size*, *income per capita*, *debt*, dan *financial condition* teruji memiliki asosiasi positif dengan pengungkapan laporan keuangan pada *website* pemerintah daerah. Jadi terapat inkonsistensi hasil pada penelitian-penelitian sebelumnya, variabel-variabel yang diuji pada penelitian Verawaty (2012) tidak menghasilkan kesimpulan yang sama dengan penelitian-penelitian sebelumnya,

yaitu penelitian Groff dan Pittman (2004), penelitian Laswad *et al* (2005), dan penelitian Styles dan Tennyson (2007). Berikut hipotesis yang ingin diuji:

- H₁ : Terdapat asosiasi positif antara APBD pemerintahan daerah dan penyediaan laporan keuangan di internet atau *Internet Financial Reporting* (IFR) melalui *e-government* sebagai sarana transparansi, partisipasi, dan akuntabilitas publik.
- H₂ : Terdapat asosiasi positif antara *size* pemerintahan daerah dan penyediaan laporan keuangan di internet atau *Internet Financial Reporting* (IFR) melalui *e-government* sebagai sarana transparansi, partisipasi, dan akuntabilitas publik.
- H₃ : Terdapat asosiasi positif antara *debt* pemerintahan daerah dan penyediaan laporan keuangan di internet atau *Internet Financial Reporting* (IFR) melalui *e-government* sebagai sarana transparansi, partisipasi, dan akuntabilitas publik.
- H₄ : Terdapat asosiasi positif antara *population* pemerintahan daerah dan penyediaan laporan keuangan di internet atau *Internet Financial Reporting* (IFR) melalui *e-government* sebagai sarana transparansi, partisipasi, dan akuntabilitas publik.

2. METODOLOGI PENELITIAN

2.1 Populasi dan Sampel

Populasi penelitian adalah semua pemerintah daerah tingkat kota/kabupaten di Sumatera Selatan, sedangkan sampel penelitian

ditentukan berdasarkan kriteria tertentu atau *purposive sampling method*. Kriteria tersebut adalah pemerintah daerah tingkat kota/kabupaten yang memiliki *e-government* pada periode penelitian dan *e-government* tersebut tidak dalam perbaikan (*maintenance*).

2.2 Definisi Operasional

2.2.1 Variabel Dependen

Pada setiap hipotesis dalam penelitian ini, variabel dependen yang digunakan adalah *Internet Financial Reporting* (IFR).

IFR merupakan seperangkat pengumuman mengenai informasi finansial tahunan secara elektronik atau yang ada dalam *e-government* pemerintah daerah tersebut. Menurut Laswad *et al* (2005) yang mengambil data laporan keuangan berupa CAFR (*Comprehensive Financial Reporting*), IFR merupakan *comprehensive sets of financial statements*, termasuk di dalamnya *footnotes*, *partial sets of financial statements* dan/atau *financial highlights* yang meliputi *summary financial statements* dan inti dari *financial statements* tersebut yang dipublikasikan oleh pemerintah tersebut.

Indikatornya adalah ketersediaan APBD, laporan keuangan, dan potongan data dari laporan keuangan dalam *e-government* pemerintah daerah.

2.2.2 Variabel Independen

1) Budget

Berdasarkan penelitian Styles dan Tennyson (2007), *budget* merupakan indikator kondisi keuangan pemerintah dalam membiayai

penyelenggaraan pemerintahannya.

Menurut Halim (2007), *budget* (APBD) merupakan sumber penerimaan yang merupakan target minimal untuk menutupi biaya terkait aktivitas tersebut, dan adanya biaya yang merupakan batas maksimal pengeluaran yang akan dilaksanakan. Berdasarkan PP No. 71 Tahun 2010, Lampiran III yaitu PSAP 01 tentang Penyajian Laporan Keuangan, jika selisihnya lebih berarti surplus dan jika selisihnya kurang berarti defisit. Indikatornya adalah selisih antara pendapatan dan belanja APBD.

2) Size

Berdasarkan penelitian Laswad *et al* (2005), proksi variabel *size* adalah total pendapatan pemerintah daerah, yaitu kemampuan pemerintah daerah tersebut di masa yang akan datang, artinya dengan pendapatan daerahnya mampu membiayai semua belanjanya di masa yang akan datang. Indikatornya adalah nilai pendapatan LRA.

3) Debt

Berdasarkan PP No. 71 Tahun 2010, Lampiran III yaitu PSAP 01 tentang Penyajian Laporan Keuangan, hutang adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah. Proksi yang digunakan untuk *debt* adalah DSCR (*Debt Service Coverage Ratio*).

Menurut Halim (2007), dengan berdasarkan data LRA bisa dihitung tingkat kemampuan berhutang pemerintah daerah dengan DSCR, yaitu perbandingan antara jumlah PAD, Bagian Daerah (BD) dari PBB (Pajak Bumi dan Bangunan), BPHTB (Bea Perolehan

Hak Atas Tanah dan Bangunan), penerimaan sumber daya alam, dan bagian daerah lainnya serta DAU (Dana Alokasi Umum) setelah dikurangi Belanja Wajib (BW) dengan penjumlahan angsuran pokok, bunga, dan biaya pinjaman lainnya yang jatuh tempo. Indikatornya adalah Nilai DSCR APBD.

DSCR dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$DSCR = \frac{(PAD + BD + DAU) - BW}{Total (Pokok Angsuran + Bunga + Biaya Pinjaman)} \dots\dots(1)$$

4) Population

Menurut Giroux dan McLelland, 2003 dan Giroux dan Shield, 1993, secara umum, kota-kota besar akan menyediakan program dan pelayanan untuk penduduk dalam jumlah besar dan mengkonsumsi sejumlah besar sumber daya. Salah satu karakteristik kota besar adalah populasi penduduk, yaitu jumlah penduduk yang tinggal di suatu wilayah tertentu selama periode tertentu. Indikatornya adalah jumlah penduduk.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Hasil Penelitian

Berikut tabel data yang akan diolah untuk menguji hipotesis-hipotesis yang ada:

Tabel 1. Data yang Akan Diolah

NO	PEMDA	IFR	APBD	SIZE*	DEBT**	POPULATION*
1	Banyuasin	N-IFR	surplus	11.82	0.29	5.89
2	Lahat	N-IFR	surplus	11.83	0.36	5.74
3	Lubuk Linggau	IFR	surplus	11.54	0.59	5.26
4	Muara Enim	IFR	defisit	11.86	0.73	5.82
5	Musi Rawas	N-IFR	defisit	11.88	0.58	5.69

Lanjutan Tabel 1						
6	Ogan Ilir	N-IFR	defisit	11.80	0.46	5.57
7	OKU	N-IFR	defisit	11.74	0.59	5.42
8	OKU Timur	N-IFR	defisit	11.71		5.76
					0.34	
9	Pagar Alam	IFR	surplus	11.51		5.06
					0.47	
10	Prabumulih	IFR	surplus	11.54	0.74	5.13

Sumber: Data diolah peneliti

Keterangan:

IFR : Melakukan IFR (*Internet Financial Reporting*)

N-IFR : Tidak Melakukan IFR (*Internet Financial Reporting*)

* : Dalam log10

** : Dalam rasio

Pengujian hipotesis ini dengan menggunakan analisis *logistic regression* dengan menggunakan piranti lunak SPSS. Hipotesis ini dianalisis sesuai dengan model penelitian yang telah dibangun, yaitu *logistic regression* sebagai berikut:

$$IFR_{it} = \alpha_{it} + \beta_1 APBD_{it} + \beta_2 SIZE_{it} + \beta_3 DEBT_{it} + \beta_4 POPULATION_{it} + e_{it} \dots (2)$$

Tabel 2 berikut menunjukkan *Logit Result for Test of IFR Practices Model* sebagai berikut:

Tabel 2. Variables in the Equation

Variabel	B	S.E.	Wald	df	Sig.
APBD	1.792	1.443	1.541	1	.214
SIZE	-				
	12.89	7.343	3.084	1	.079
	5				
DEBT	11.79	7.532	2.451	1	.105
	2				
POPULATION	-				
	5.627	3.315	2.882	1	.090

Sumber: Data diolah peneliti

3.2 Pembahasan

3.2.1 Hipotesis 1

Berdasarkan hasil regresi pada tabel 2 dengan nilai signifikansi 0,214, penelitian ini tidak menunjukkan bahwa terdapat asosiasi

positif antara *budget* (APBD) pemerintah daerah dan penyediaan laporan keuangan di internet atau IFR melalui penerapan *e-government*. Hal ini juga menunjukkan bahwa nilai *budget* tidak menjadi variabel yang dapat memprediksi ketersediaan IFR melalui *e-government*.

Tidak terdapatnya asosiasi positif nilai APBD apakah nilainya surplus atau defisit terhadap ketersediaan IFR melalui *e-government* menyiratkan bahwa transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi publik di Sumatera Selatan sangat rendah sekali. Hal ini disebabkan karena pemerintah daerah tersebut tidak berani mempublikasikan APBD walaupun nilai selisih pendapatan dan belanja tersebut surplus.

Mendukung penelitian sebelumnya, Verawaty (2012) bahwa tidak ada asosiasi *budget* (APBD) pemerintah daerah dan penyediaan laporan keuangan di internet atau IFR melalui penerapan *e-government*. Namun berdasarkan penelitian di luar negeri, yaitu penelitian Styles dan Tennyson (2007), kondisi keuangan dalam hal ini APBD merupakan salah satu faktor yang menentukan ada atau tidaknya IFR melalui *e-government* yang telah dimiliki yang juga didukung oleh penelitian Chase dan Phillips (2004) dan Laswad *et al* (2005). Penelitian-penelitian tersebut membuktikan kondisi keuangan memberikan biaya dan keuntungan politis bagi kepala daerahnya. Dengan mempertimbangkan biaya (keuntungan) profesional dan politis atas hasil (positif ataupun negatif) yang disajikan dalam data APBD, pemerintah daerah mungkin memiliki dorongan untuk memberi kurang (lebih) perhatian untuk ketersediaan data bagi pengunjung *website e-government*.

Berdasarkan wawancara yang dilakukan peneliti terhadap praktisi-praktisi pemerintah daerah, hambatan di *bidang regulasi* yang menjadi alasan penting sehingga IFR masih dianggap bersifat *voluntary* (sukarela). Jadi, pentingnya peran pemerintah pusat untuk membuat *master plan* dan *grand strategy e-government* atau *pedoman penyelenggaraan e-government*, termasuk standarisasi konten yang di dalamnya mencakup IFR yang dituangkan dalam regulasi seperti undang-undang atau peraturan pemerintah dengan disertai petunjuk pelaksanaan teknisnya karena implementasi membutuhkan tindakan dan penyediaan sarana dan bukan hanya konsep belaka.

3.2.2 Hipotesis 2

Berdasarkan hasil regresi pada Tabel 2 dengan nilai signifikansi 0,079 ($p < 0,10$), penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat asosiasi positif antara *size* pemerintah daerah dan penyediaan laporan keuangan di internet atau IFR melalui penerapan *e-government*. Hal ini juga menunjukkan bahwa nilai *size* menjadi variabel yang dapat memprediksi ketersediaan IFR melalui *e-government*.

Size pemerintah daerah dengan proksi jumlah pendapatan yang ada dalam LRA ternyata memiliki asosiasi positif terhadap ketersediaan IFR. Pendapatan dalam APBD tersebut mengindikasikan kemampuan pemerintah daerah tersebut, artinya dengan pendapatan daerahnya mampu membiayai semua belanjanya termasuk biaya *e-government*. Artinya diasumsikan jika pendapatannya besar, maka kemampuan daerah tersebut untuk memiliki *e-government* dan bereksplorasi

dengan semua konten yang dapat mempublikasikan data kepada publik juga lebih besar.

Hasil penelitian ini tidak mendukung penelitian Verawaty (2012), tetapi mendukung penelitian di luar negeri, yaitu penelitian Laswad *et al* (2005) bahwa tingkat pendapatan yang menjadi proksi *size* pemerintah daerah berasosiasi positif dengan ketersediaan laporan keuangan atau IFR melalui *e-government* yang dimiliki. Hasil penelitian tersebut membuktikan bahwa kebutuhan daerah untuk menyajikan lebih banyak data dalam IFR tergantung pada jumlah aset atau jumlah pendapatannya karena variabel-variabel tersebut mencerminkan *size* atau kemampuan daerah tersebut dalam membiayai aktivitas pelayanan publik sehingga jika dipublikasikan dalam aplikasi IFR dalam *e-government* akan menunjukkan *size* pemerintah daerah tersebut. Menurut Chase dan Phillips (2004), pendapatan mengindikasikan kemampuan pemerintah daerah tersebut di masa yang akan datang, artinya dengan pendapatan daerahnya mampu membiayai semua belanjanya. Penelitian ini juga didukung oleh Styles dan Tennyson (2007) bahwa kondisi keuangan akan menjadi patokan bagi aktivitas pemerintah daerah tersebut.

3.2.3 Hipotesis 3

Berdasarkan hasil regresi pada Tabel 2 dengan nilai signifikansi 0,105, penelitian ini tidak menunjukkan bahwa terdapat asosiasi positif antara *debt* pemerintah daerah dan penyediaan laporan keuangan di internet atau IFR melalui penerapan *e-government*. Hal ini juga menunjukkan bahwa nilai *debt* tidak

menjadi variabel yang dapat memprediksi ketersediaan IFR melalui *e-government*.

Pemerintah menggunakan hutang untuk membiayai pelayanan dan program yang relevan untuk disediakan bagi penduduk di daerah tersebut. Suatu evaluasi dari hutang daerah merupakan sebuah komponen integral dari akuntabilitas administrasi pemerintahan lokal. Membiayai pengeluaran daerah dengan hutang mengakibatkan kemampuan daerah tersebut untuk menyediakan program dan pelayanan di masa yang akan datang. Artinya diasumsikan pemerintah daerah dengan tingkat rasio kemampuan berhutang terbesar merupakan instansi yang seharusnya tidak memiliki alasan untuk tidak mempublikasikan laporan keuangan melalui *e-government* yang memang telah dimiliki. Sampel penelitian ini memang tidak memiliki rasio di atas 2,5 karena jika ternyata suatu pemerintah daerah berhutang atau memiliki DSCR di atas 2,5, maka mungkin terdapat/akan terdapat tekanan politis untuk mempublikasikan laporan keuangannya secara transparan, partisipatif, dan akuntabel terhadap debitur ataupun *stakeholder* lainnya. Walaupun sebenarnya dengan hutang paling rendah sekalipun, publik berhak mengetahui laporan keuangan pemerintah daerahnya.

Hasil penelitian ini mendukung penelitian Verawaty (2012), tetapi tidak dengan penelitian sebelumnya. Menurut Zimmerman (1977), penggunaan hutang untuk membiayai aktivitas publik merupakan pendorong bagi manajer sektor publik untuk mengurangi biaya hutang. Hal ini dapat diraih dengan IFR karena dengan media internet, pendistribusian laporan keuangan menjadi lebih efisien, efektif, dan ekonomis. Hal

ini juga didukung oleh penelitian Styles dan Tennyson (2007) bahwa untuk memperluas *stakeholder* yang membutuhkan informasi laporan keuangan tanpa mengurangi kemampuannya untuk memenuhi permintaan penduduk di masa yang datang untuk pelayanan publik, maka dengan memanfaatkan media internet yang telah dimiliki atau IFR melalui *e-government* merupakan aktivitas yang tidak akan menambah hutang daerah.

Berdasarkan Verawaty (2012), hutang tidak menjadi alasan signifikan ketersediaan IFR. Menurut penelitian tersebut, *e-government* memang telah diwajibkan berdasarkan Undang-Undang Telematika Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2001 tentang Telematika (Telekomunikasi, Media, dan Informatika). Dalam instruksi itu dinyatakan bahwa aparat pemerintah harus menggunakan teknologi telematika untuk mendukung *good governance* dan mempercepat proses demokrasi. Kemudian dikuatkan lagi dengan kebijakan tentang penerapan *e-government* dalam bentuk Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2003. Terlebih lagi dengan Undang-undang Keterbukaan Informasi Publik No. 14 Tahun 2008 yang secara eksplisit menyatakan bahwa laporan keuangan merupakan salah satu dari informasi publik yang wajib dipublikasikan. Namun secara umum hampir di seluruh pemerintah daerah belum memiliki *infrastruktur* yang memadai untuk mengimplementasikan regulasi-regulasi tersebut. Berdasarkan wawancara yang dilakukan peneliti terhadap praktisi-praktisi pemerintah daerah, hal ini disebabkan karena pemerintah juga belum menyiapkan pendanaan (*budget*) atau alokasi dana dari hutang untuk membiayai eksplorasi

aplikasi *e-government* atau tidak yang memadai untuk keperluan ini.

Menurut Sosiawan (2008), kendala infrastruktur bisa diatasi tanpa menunggu dana APBD, yaitu melalui *partnership* dengan pihak swasta. Solusi ini dalam bentuk kebijakan pemerintah untuk merangkul pihak swasta khususnya *provider* ICT (*Information and Communication Technology*) dalam bentuk kerja sama terpadu yang tentunya menguntungkan kedua belah pihak.

3.2.4 Hipotesis 4

Berdasarkan hasil regresi pada Tabel 2 dengan nilai signifikansi 0,090 ($p < 0,10$), penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat asosiasi positif antara *population* pemerintah daerah dan penyediaan laporan keuangan di internet atau IFR melalui penerapan *e-government*. Hal ini juga menunjukkan bahwa nilai jumlah penduduk menjadi variabel yang dapat memprediksi ketersediaan IFR melalui *e-government*.

Pemerintah daerah menghadapi kenaikan permintaan atau tuntutan terhadap pengawasan informasi dan dorongan yang lebih besar terhadap kinerja. Secara umum, daerah dengan jumlah penduduk yang besar juga akan menyediakan program dan pelayanan untuk penduduk dalam jumlah besar dan mengkonsumsi sejumlah besar sumber daya. Dengan demikian semakin besar jumlah penduduk, maka semakin besar pula tuntutan akan pengungkapan keuangan sektor publiknya.

Hasil penelitian ini tidak mendukung penelitian Verawaty (2012), tetapi tidak dengan penelitian sebelumnya. Berdasarkan penelitian

terdahulu, menurut Girux dan Shield, 1993 dan Giroux dan McLelland, 2003, pemerintah daerah menghadapi kenaikan permintaan atau tuntutan terhadap pengawasan informasi dan dorongan yang lebih besar terhadap kinerja. Secara umum, kota-kota besar akan menyediakan program dan pelayanan untuk penduduk dalam jumlah besar dan mengkonsumsi sejumlah besar sumber daya. Aktivitas yang lebih besar tersebut mengakibatkan permintaan informasi dalam jumlah yang besar atas informasi kinerja pemerintah, termasuk juga pemerintah daerah. Permintaan tersebut dapat diakomodir melalui IFR yang merupakan metode pengungkapan alternatif yang lebih efektif semakin besar anggaran yang dapat terkumpul dan tentunya semakin tinggi pula tuntutan akan fungsi akuntansi. Penelitian ini didukung oleh Styles dan Tennyson (2007) yang membuktikan bahwa kota dengan jumlah penduduk yang besar memiliki probabilitas yang lebih tinggi untuk melakukan IFR melalui *e-government*.

4. SIMPULAN

Penelitian ini bertujuan untuk menguji untuk mengetahui dan menganalisis apakah probabilitas terjadinya penerapan *e-government* melalui IFR dapat diprediksi dengan variabel *budget* (APBD), *size*, *debt*, dan *population* pemerintah daerah. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa terdapat probabilitas variabel IFR terhadap *size* dan *population* pada tingkat signifikansi 10%. Namun untuk variabel *budget* (APBD) dan *debt* tidak menunjukkan signifikansi. Melalui metoda wawancara

diperoleh argumen bahwa *regulasi dan pedoman penyelenggaraan e-government, terdapat alokasi dana dari hutang untuk membiayai eksplorasi aplikasi e-government atau tidak, infrastruktur yang menjadi pertimbangan untuk melakukan IFR melalui e-government yang dimiliki.*

DAFTAR RUJUKAN

- Brecher, C., Richwerger, K., Van Wagner, M., 2003. *An Approach to Measuring the Affordability of State Debt*. Public Budgeting and Finance Journal, 23 (4):65-85.
- Chase, B.W. & Phillips, R.H., 2004. *GASB 34 and government financial condition: An analytical toolbox* (Governmental Accounting Standards Board). Government International Research. Journal of Finance & Economics, 37, 96-101.
- Giroux, G., & Shields, D., 1993. *Accounting Controls and Bureaucratic Strategies in Municipal Government*. Journal of Accounting and Public Policy, 12:239-262.
- Giroux, G. & McLelland, A.J., 2003. *Governance Structures and Accounting at Large Municipalities*. Journal of Accounting and Public Policy, 22:203-230.
- Gore, A., 2004. *The Effects of GAAP Resolution and Bond Market Interaction on Local Government Disclosure*. Journal of Accounting and Public Policy, 23: 23-52.
- Groff, J.F., & Pitman, M.K., 2004. *Municipal Financial Reporting on the World Wide Web: A Survey of Financial Data Displayed on the Official Websites of the 100 largest US Municipalities*. Journal of Government Financial Management, 53 (2): 20-30.
- Halim, Abdul, 2007. *Akuntansi dan Pengendalian Pengelolaan Keuangan Daerah*. Penerbit UPP STIM YKPN. Yogyakarta.
- Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2001. *Telematika (Telekomunikasi, Media dan Informatika)*.
- Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2003. *Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan E-Government*.
- Laswad, Fawzi, Fisher, Richard & Oyelere, Peter, 2005. *Determinants of Voluntary Internet Financial Reporting by Local Government Authorities*. Journal of Accounting and Public Policy. Vol. 24 Hal 101-121.
- PP No. 71 Tahun 2010. *Standar Akuntansi Pemerintahan*.
- Sosiawan, Edwi Arief, 2008. *Tantangan dan Hambatan dalam Implementasi E-Government di Indonesia*. (Online). <http://edwi.dosen.upnyk.ac.id>. Diakses tanggal 25 September 2014.
- Styles, Alan K. & Tennyson, Mack, 2007. *The Accessibility of Financial Reporting of US Municipalities on the Internet*. Journal of Public Budgeting, Accounting and Financial Management. Spring. Vol. 19 Hal. 56
- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008. *Keterbukaan Informasi Publik*.
- Verawaty, 2012. *The Availability of IFR (Internet Financial Reporting) through E- Government as Public Transparency, Participation, and Accountability Means In Indonesia*, proceedings of The 13th Malaysia-Indonesia Conference on Economics, Management and Accounting (MICEMA), Palembang, Indonesia, pp. 562-579.
- Zimmerman, J., 1977. *The Municipal Accounting Maze: An Analysis of Political Incentives*. Journal of Accounting Research, 15: 107-144.